



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO PAMUNGKAS
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 865264

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 670.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
2. MOBIL, IZUZU PIKUP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
3. MOBIL, FORTUNER JEEP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
475.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
5. MOTOR, HONDA PITUNG Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
6. MOTOR, HONDA PITUNG Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 555.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.089.608.989



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.965.108.989
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.905.108.989

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.